

**PERAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DALAM KONTEK
EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM JURUSAN
PERBANKAN SYARIAH**

U. Syafrudin dan Ridwan Widagdo

Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
e-mail : ridwanwidagdo@ymail.com

Abstrak

Perguruan tinggi mengemban budaya akademik yang mempunyai kekhasan dalam beberapa aspek, di antaranya aspek social, aspek pembelajaran, aspek kompetensi, dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa hadir di Perguruan Tinggi. Kurikulum merupakan suatu naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan oleh para pelajar agar menjadi para lulusan berkompeten. Oleh karena itu kurikulum diibaratkan sebagai “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.

Berdasarkan itu, maka Kurikulum Ekonomi Syariah dibangun dengan memadukan antara ilmu-ilmu teoritis dengan praktis (30:70), ekonomi konvensional dengan ekonomi Syariah (40:60), Ilmu Keislaman (30 persen), Ilmu Kesyariahan (20 persen) – Ushul Fiqih, Qawaid Fiqhiyah fi al-Iqtishad, Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah dan Fikih Zakat dan Wakaf. Selain itu, kurikulumnya juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat (30 persen), yang terdiri dari, bahasa (Arab/Inggris), ICT (Aplikasi Komputer), Matematika, Statistik dan Akuntansi.

Peran yang paling penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Cirebon agar dapat bersinergi dengan perbankan syariah yang ada di Cirebon, Dalam proses pembelajaran, penyusunan harus memuatkan mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi.

Kata Kunci : *Perguruan Tinggi Islam, Ekonomi Islam, kurikulum , Perbankan Syariah*

Abstract

Colleges carry out the academic culture that has kekhasan in several aspects, including social aspects, aspects of learning, competence aspects, and aspects of personality. These aspects become inspirational realization of an academic community with scientific reason more adults are available at the College. The curriculum is a draft guide on the experience that must be obtained by the students to become competent graduates. Therefore the curriculum described as "track racing" or "vehicle" for achieving educational goals and competencies of graduates.

Based on that, the curriculum of Islamic Economics is built with a combination of theoretical sciences with practical (30:70), conventional economics to Islamic economics (40:60), Islamic Sciences (30 percent), Science Kesyarahan (20 percent) - Usul Fiqh , Qawaid fiqhiyah fi al-Iqtishad, Ayat-Ayat and Hadith Islamic Economics, Tenets Jurisprudence and Zakat and Waqf Jurisprudence. In addition, the curriculum also equipped with tools sciences (30 percent), which consists of, languages (Arabic / English), ICT (Computer Applications), Mathematics, Statistics and Accounting.

The most important role that must be carried out by universities in Cirebon in order to synergize with Islamic banking in Cirebon, in the learning process, the preparation must load courses that support the achievement of the competence of graduates and provide flexibility to students to broaden their horizons and deepen their expertise in accordance with interests, and is equipped with course descriptions, syllabi, lesson plans, and evaluations.

Keywords: *Islamic Institute of Islamic Economics, curriculum, Islamic Banking*

Pendahuluan

Perguruan Tinggi adalah salah satu factor yang paling penting dalam memperkenalkan dan mensyiarkan ekonomi syariah di Indonesia, oleh karena itu sangat memprihatinkan jika kita mendengar ada kampus Islam tetapi belum membuka prodi atau jurusan ekonomi syariah, dalam seminar ini di jelaskan bagaimana urgensi dan prospek perguruan tinggi Islam yang akan membuka prodi atau jurusan Ekonomi Syariah.

Lembaga perguruan tinggi merupakan suatu Institusi atau wadah ilmiah di mana mahasiswa mencari ilmu dan sekaligus melakukan penelitian dan

pengabdian terhadap masyarakat atas ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah. Teori yang di peroleh di ruang kelas merupakan hasil transpert pengetahuan antara dosen dan mahasiswa di aplikasikan di masyarakat dalamujud Kuliah Kerja Yata sebagai wujud pengabdian pada masyarakat. Untuk menempuh gelar kesarjanaan mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya ilmiah sebagai ciri dari kaum intelektual.¹ Peran perguruan tinggi di harapkan mampu

1 Amir Mualim, Karakteristik Perguruan Tinggi

mencetak calon sarjana yang trampil dan professional di bidangnya.²

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.

Pengembangan mengarah pada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan para pekerja. Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pegawai adalah suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang.

Menurut Schuler dan Youngblood yang menekankan bahwa mempelajari pengembangan sumber daya manusia dari organisasi, manusia sebagai bagian dari organisasi, sehingga diungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasi akan melibatkan berbagai faktor yaitu pendidikan dan pelatihan.³

Pada pengembangan kualitas manusia melalui pengembangan kemampuan berfikir yang antara lain dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan untuk menilai keadaan. Pendidikan formal diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar dalam pengembangan kemampuan berfikir melalui materi dasar hitung menghitung, membuat perbandingan, mengekspresikan ide melalui tulisan, membuat keputusan dengan kendala-kendala tertentu dan lain-lain. Termasuk dalam pendidikan formal ini adalah pengembangan

sikap tepat waktu, sikap kerapian, dan lain-lain.⁴

Mahasiswa sebagai *agent of change* (pelaku perubahan) dituntut untuk dapat memberikan perubahan yang positif bagi lingkungannya. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu menunjukkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Pemikiran lama yaitu tugas memasyarakatkan Syariah Islam hanya tugas para ahli Syariah dan praktisi Syariah Islam harus ditinggalkan. Mahasiswa juga berkewajiban dalam memasyarakatkan Syariah Islam.

Berbagai peran dapat diambil oleh mahasiswa dalam memasyarakatkan Syariah Islam. Peran yang paling sederhana adalah sosialisasi dari mulut ke mulut (*door to door*) terhadap lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan teman-temannya sampai keperan yang besar sekalipun seperti terjun langsung ke sebuah lingkungan dan menerapkan sistem Syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tersebut.

Mahasiswa yang mengambil peran tersebut hendaknya bukan mahasiswa Fakultas Syariah atau mahasiswa yang mengambil studi Syariah Islam saja, tapi juga dilakukan oleh mahasiswa secara keseluruhan tanpa memandang studi yang diambilnya. Karena untuk mewujudkan sebuah perubahan, diperlukan dukungan dari semua elemen pengusung perubahan itu sendiri (mahasiswa). Tetapi, untuk langkah awal pergerakan ini, tampaknya masih fokus dilakukan oleh mahasiswa yang memang memiliki latar belakang ilmu Syariah, terutama Syariah Islam.

Pembahasan

Perguruan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya

2 Muzamil Qomar, Menejemen pendidikan Islam, Hlm 3

3 Sanerya Hendrawan, *Pengembangan Human Capital*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 148

4 Yudo Swasono dan Endang Sulistyarningsih, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Cv Izufa Gempita, 1993), hlm. 22

intelektual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan memproduksi, mengkonstruksi dan merevitalisasi paradigma sumber daya manusia itu, agar mereka memiliki perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik di mata masyarakat sebagai bekal kehidupannya-tentu saja tidaklah mudah. Perguruan tinggi tidak saja harus dituntut segi-segi otentitasnya secara yuridis dan eksistensial agar legitimasinya di akui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah institusi yang capable mengelola dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

Kurikulum sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, dalam proses perencanaannya memiliki ketentuan sebagai berikut:⁵

- a. Perencanaan kurikulum biasanya menggunakan judgment ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa.
- b. Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertibangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa, urutan pelajaran dan lain sebagainya.
- c. Perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan kepada pengguna metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran, semacam menggunakan pendekatan ekspositori.

Kurikulum merupakan suatu naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan oleh para pelajar agar menjadi para lulusan berkompeten yang seharusnya. Oleh karena itu kurikulum merupakan kondisi ideal dibandingkan kondisi real.

⁵ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 5

Kurikulum diibaratkan sebagai “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu dan menjadi agen perubahan social (*agent social of change*). Perguruan tinggi mengemban budaya akademik yang berpangkal pada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik yang ada pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi di banding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek, di antaranya aspek social, aspek pembelajaran, aspek kompetensi, dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa hadir di Perguruan Tinggi.⁶

Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah secara komprehensif dan memadai serta memiliki integritas yang tinggi, maka dibutuhkan lembaga pendidikan ekonomi syariah yang secara khusus menyiapkan sumber daya insani ekonomi syariah Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang harus bertanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya manusia keuangan syariah yang berkualitas.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan Ekonomi Islam. Dari kampuslah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Islam berasal. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, SDI yang dibutuhkan adalah

⁶ Buku panduan penerimaan mahasiswa baru tahun 2015

mereka yang tidak hanya faham ekonomi Islam secara filosofis-normatif tapi juga positif-empiris. Dua penguasaan ini tetap harus didukung oleh pembangunan karakter yang baik. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerjasama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi.

Kurikulum Aktual dan Kurikulum Ideal

Setiap guru seharusnya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kurikulum tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Sebagai sebuah pedoman kurikulum berperan penting dalam merancang pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Oleh karena itu guru dapat menentukan hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa.
- b. Menentukan isi atau materi yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan atau penguasaan kompetensi.
- c. Menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa sebagai upaya pencapaian tujuan.
- d. Menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi.

Sedangkan kurikulum actual (nyata) adalah pembatasan yang dilakukan oleh guru terhadap penerapan kurikulum yang ada. Kurikulum ini secara riil dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan kondisi yang ada.

Pengembangan Kurikulum

Kamus bahasa Indonesia kata "pengembangan" secara etimologi yaitu

⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, hlm. 22

berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan.⁸ Secara istilah, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan.⁹ Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut.

Pengertian pengembangan di atas, berlaku pula dalam bidang kajian "kurikulum", kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian.¹⁰

Bila kurikulum itu sudah cukup dianggap mantap, setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas pengembangan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan. Hal ini berlaku pula untuk setiap komponen kurikulum, misalnya pengembangan metode mengajar, pengembangan alat pelajaran dan sebagainya.

Selaras dengan pengertian dan pemahaman di atas, adalah pendapat Ahmad dan kawan-kawannya dalam buku *Pengembangan Kurikulum* yang

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 538

⁹ Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 45

¹⁰ A. Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum*, (Surabaya: Bina ilmu, 1993), hlm. 33

mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu.¹¹

Kedua pendapat di atas apabila dikalsifikasi meliputi beberapa unsur:

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pelaksanaan
- d. Penilaian
- e. Usaha penyempurnaan

Berpijak pada unsur-unsur ini, dapatlah peneliti simpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum sekolah, kemudian diaplikasikannya ke dalam kelas sebagai wujud proses belajar mengajar disertai dengan penilaian-penilaian terhadap kegiatan tersebut, sebagai langkah penyempurnaan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan bagus.

Pengembangan kurikulum suatu proses siklus, yang tidak pernah ada starting dan tidak pernah berakhir. Hal ini disebabkan pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang tertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum, yang di dalamnya meliputi tujuan, isi (materi), metode, organisasi dan penilaian itu sendiri.¹²

11 HM. Ahmad dkk, *Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 64

12 Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum*, hlm. 34

Pengembangan kurikulum mengandung pengertian sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, dan atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum.¹³

Metode Pembelajaran Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata: *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*.¹⁴

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.¹⁵

13 Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 10

14 Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002), hlm.18

15 M. Ismail Yusanto Dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 13

Pada tataran teoritis dan konseptual, kita masih merasakan sangat kekurangan SDI yang benar-benar mendalami ilmu ushul fikih, fikih muamalah, qawa'id fikih dan sekaligus ilmu ekonomi keuangan modern. Figur seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarakat Islam di Indonesia melainkan juga di banyak negara termasuk negara lain yang perkembangan ekonomi Islamnya cukup pesat. Kebanyakan SDI perbankan syariah saat ini adalah mereka yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi keuangan kontemporer, tetapi awam dalam ushul fiqh atau fiqh muamalah. Sebaliknya banyak pakar yang mahir dalam fikih dan usul fiqh tetapi kurang memahami tentang ilmu ekonomi keuangan.

Untuk melahirkan SDI yang berkompeten di bidang ekonomi, bisnis dan hukum ekonomi syari'ah secara komprehensif dan memadai, serta memiliki integritas tinggi, makadibutuhkan lembaga pendidikan ekonomi syari'ah yang secara khusus menyiapkan SDI ekonomi syari'ah. SDI ekonomi syari'ah, tidak boleh lagi bersifat bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini.

Lembaga pendidikan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menghasilkan SDI keuangan syariah yang berkualitas. Dalam pengembangan pendidikan ekonomi keuangan syariah di masa yang akan datang setidaknya ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius, seperti kurikulum yang tepat; mengkombinasikan mata kuliah yang memberikan pengetahuan profesionalitas ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis dan pengetahuan syariah (hukum & aplikasi) serta nilai-nilai moral (akidah & akhlak).

Dalam penyusunan kurikulum perlu melibatkan seluruh potensi prodi, untuk mencapai sebuah dinamika dari inovasi yang dibutuhkan agar kurikulum tetap actual dan terintegrasi dengan sistem pembelajaran dan memiliki relevansi yang kuat dengan

tujuan, cakupan dan kedalaman materi dari suatu mata kuliah. Penyusunan kurikulum itu merupakan wujud untuk membentuk *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang akan diaplikasikan dalam proses pembelajaran.

Kurikulum yang telah disusun memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi.

Kebutuhan terhadap evaluasi dan revisi kurikulum itu dilakukan dengan pertimbangan tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan pasar khususnya industry keuangan syariah, dan yang terpenting adalah membekali para mahasiswa agar ilmu yang mereka peroleh dapat diterapkan dengan baik di dunia kerja, sehingga setiap output yang dihasilkan oleh Program Studi perbankan syariah maupun ekonomi syariah mampu bersaing dalam bursa dunia kerja yang sangat kompetitif, bahkan mampu menjadi wira usaha mandiri yang mumpuni berani menunjukkan ciri sebagai pelaku ekonomi dan bisnis syari'ah.¹⁶

Dalam penyusunan kurikulum ekonomi syariah harus mengedepankan kesepahaman bahwa kurikulum tersebut merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan

16 Muhammad Maulana, dkk, Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pada Jurusan Perbankan Syariah, Pus at Penelitian dan Penerbitan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013,

memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi.¹⁷

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Mengartikan Lembaga Keuangan Syariah, maka ada tiga kata terlebih dahulu yang harus dipahami secara parsial, yaitu lembaga, keuangan dan Syariah. Lembaga dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan institution dan dalam bahasa Indonesia setara dengan pranata.¹⁸ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa lembaga ini lebih berarti sebagai sebuah wadah atau sistem yang menampung dan mengatur perilaku tertentu dalam masyarakat.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non finansial atau aset riil.¹⁹ Lembaga ini menyalurkan dan memberikan pendanaan atau pembiayaan kepada calon nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga serta menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya, seperti proteksi asuransi, program pensiunan, skema tabungan serta transfer, kliring dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan ialah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan kegiatan dalam bidang

keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.²⁰

Ini berarti lembaga dibatasi dengan hanya mencakup dalam bidang keuangan, dapat dikatakan bahwa lembaga ini hanya bergerak dalam bidang keuangan, dan melakukan penghimpunan serta penyaluran dana. Lembaga Keuangan Syariah (Syaria financial institution) adalah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial asset) maupun non-financial aset atau aset riil berdasarkan konsep Syariah.²¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah.²² Maka dari itu lembaga ini dalam transaksinya tidak mungkin mengenal istilah bunga dalam artian tidak memakai sistem bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil dan tidak mungkin menyalurkan dananya kepada usaha-usaha yang di dalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah serta proyek-proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Macam-macam Lembaga Keuangan Syariah

20 Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar, Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*, (Cipuat: Kholam Publishing, 2008), hlm. 245

21 Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta-Timur: Penerbit Zikrul Hakim, 2008), hlm. 5

22 H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 58

25 Hasil Penyampaian pendapat Armiadi pada FGD Kurikulum Prodi HES, pada tanggal 23 Juni 2013 di Faklutas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

18 H.A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

19 Wiroso, *Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi UU Perbankan Syariah & kodifikasi Produk Bank Indonesia*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 15

Ditinjau dari segi tugas dan fungsinya, Lembaga Keuangan Syariah dapat dibedakan kedalam dua macam, pertama; lembaga keuangan dalam bentuk bank, yaitu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan akad (transaksi) ekonominya terutama menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem Syariah atau hukum Islam.²³ Kedua; lembaga keuangan non bank, yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Pembahasan

Standar kompetensi merupakan rumusan tentang kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang didasari atas pengetahuan, keterampilan yang didukung sikap kerja dan penerapannya sesuai untuk kerja yang dipersyaratkan.²⁴

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi sarjana. Kurikulum adalah rancangan studi sarjana dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan program studi sarjana. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi sarjana dengan

memperhatikan masing-masing program studi sarjana. Program studi sarjana menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tatarutan, kedalaman, keluasan dan penyertaan komponen tertentu.

Penyusunan kurikulum Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini telah mengacu kepada Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Program Pendidikan Stara 1 Perbankan Syariah (Ekonomi Islam) memiliki lama studi 8 (delapan) semester dengan batas maksimal 14 semester. Kurikulum terdiri dari Kurikulum Inti sebesar 66 SKS dan Kurikulum Institusional 91 SKS.

Kurikulum Inti terdiri dari teori. Sedangkan Kurikulum Institusional dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta menjadi ciri khas institusi pendidikan Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kurikulum Konsentrasi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini telah berulang kali disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dalam rangka menciptakan para lulusan (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi agar tercipta kesesuaian antara kebutuhan institusi dan Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Ahmad Dahlan berpendapat bahwa, Institusi yang bapak pimpin dalam membangun jaringan dengan Institusi lain dengan berkembangnya perbankan syariah: “Kami mengadakan MDV atau kerjasama baik yang sudah berjalan maupun yang akan datang, jalam membangun jaringan dengan institusi / lembaga lain terutama dengan

23 Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar, Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*, hlm. 249

24 Mangkuprawira, S. Tb, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 154

lembaga perbankan Syariah maupun dengan kopentren dan MBT”²⁵.

Arah pengembangan program studi ekonomi syariah tentu saja harus diselaraskan dengan visi dan misi program studi tersebut.

Sesuai dengan visi dan misi yang sudah dipaparkan di muka, maka ada empat aspek yang akan dikembangkan dalam meraih ekselensi, yaitu:

1. Memperluas akses pendidikan ekonomi syariah. Untuk memperluas akses pendidikan ekonomi syariah, maka sudah sewajarnya jika dilakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan tentang program studi ekonomi syariah secara memadai. Di dalam kerangka ini, maka sangat perlu membangun imaje yang baik agar lembaga tersebut dikenal oleh public. Program pencitraan berbasis pada kualitas dalam berbagai aspek akan menjadi sesuatu yang diperlukan. Sebagaimana perkembangan zaman, bahwa ke depan seirama dengan tuntutan kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan, maka lembaga pendidikan yang bermutu saja yang akan diminati oleh mahasiswa. Semakin berkualitas lembaga pendidikan tersebut akan semakin besar peluangnya untuk memperoleh sumberdaya mahasiswa. Dan semakin berkualitas fungsi akademik lembaga pendidikan tersebut juga akan berdampak pada peluang besarnya kualitas lulusan lembaga pendidikan tersebut. Semakin ketatnya kompetisi lulusan dalam mengakses pekerjaan tentu harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sebagai pintu memperluas akses dimaksud.

2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan program ekonomi syariah. Agar memperoleh akses yang memadai, maka lembaga pendidikan harus mengembangkan diversifikasi program studinya. Untuk kepentingan ini, maka pengembangan program studi yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kelayakan menjadi sangat penting. Di era semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga professional di dalam bidang ekonomi syariah, maka program studi diversifikatif di bidang ekonomi syariah sangat diperlukan. Makanya analisis kebutuhan pasar dan analisis pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk membuka prodi yang relevan dengan kebutuhan dimaksud. Kemudian, yang juga dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan. Bagi prodi yang sudah eksis, maka harus dilakukan upaya agar program studi dimaksud menjadi ekselen. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan terhadap eksisting dosen dalam pendidikan dan kebutuhan penguatan dosen yang diperlukan. Selain itu, juga penguatan program akademik, ketenagaan dan proses pendidikan yang terstandardisasikan sesuai dengan jaminan mutu yang diakui baik nasional maupun internasional.
3. Mengembangkan dan memperkuat sarana dan infrastruktur pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berencana menjadi ekselen, maka salah satu tuntutannya adalah kehebatan infrastruktur kependidikannya. Infrastruktur tersebut meliputi prasarana gedung perkuliaan yang meliputi sarana ruang kuliah yang fully multi media, sarana Information and communication technology yang memadai, laboratorium yang ekselen, lingkungan kampus yang asri dan indah, dan sarana prasarana penunjang yang mencukupi.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan selaku ketua prodi Ekonomi Islam kampus STEI Al-Ishlah Bobos Kabupaten Cirebon

Ketercukupan sarana pasarana dan infrastruktur yang memadai akan dapat menjadi jaminan akan lahirnya kualitas alumni yang professional sesuai dengan bidang studinya. Selain itu juga menjamin akan terwujudnya budaya akademik yang tinggi sesuatu dengan tujuan membangun kampus akademis.

4. Membangun manajemen dan tata kelola sesuai dengan mandate reformasi birokrasi. Lembaga pendidikan tinggi memiliki fungsi pelayanan public. Oleh karenanya tentu dituntut agar di dalam pelayanan public tersebut berbasis pada pelayanan prima. Tolok ukur pelayanan prima adalah kepuasan pelanggan. Jika pelanggan kita puas dengan pelayanan yang diberikan, maka berarti bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut telah memenuhi criteria pelayanan prima. Untuk ias melakukan pelayanan prima, maka manajemen lembaga pendidikan tinggi harus memenuhi criteria transparansi,

Senada dengan yang di sampaikan oleh Dosen Ekonomi Islam bapak Baydhawi kampus STAI Mahad ali Babakan Ciwaringin:

“Dalam membangun jaringan jurusan Ekonomi Islam dengan mengadakan workshop kurikulum dengan para praktisi ekonomi baik ekonomi Islam maupun ekonomi umum yang berada di Cirebon maupun luar Kota Cirebon agar penerapan kurikulum selaras dengan kebutuhan di dunia kerja”.²⁶

Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keilmuan dan Praksis

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama yang sama-sama mendatangkan kemaslahatan. Bagi yang

tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil resiko, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba. Inilah beberapa konsep Ekonomi Islam berbasis non ribawi yang ditawarkan untuk membangun kesejahteraan bersama.

Peneriti wawancara dengan kampus STEI Al-Islah Bobos mengatakan:

“Perkembangan Ekonomi Islam berdampak baik sesuai dengan keilmuan dalam menghadapi perkembangan dalam menuju keilmuan yang praktis sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dunia kerja dalam memenuhi kebutuhan keilmuan yang dijalaninya”.²⁷

Salah satu indikator tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Islam berbasis non ribawi di Indonesia adalah tumbuh subur dan berkembang pesatnya insdustri perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank, seperti asuransi syariah, gadai syariah, investasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah (BMT) bisnis syariah dan lain-lainnya.

Perbankan Syariah tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Sebab, karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, didasarkan pada, prinsip bagi hasil yang mendatangkan keuntungan bukan hanya pada bank tetapi juga bagi masyarakat, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Bhaidhawi selaku ketua prodi Ekonomi Islam kampus STAI Ma'had Ali Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan selaku ketua prodi Ekonomi Islam kampus STEI Al-Islah Bobos Cirebon

bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah seperti yang diuraikan di atas, Indonesia harus memiliki capacity building untuk mengembangkan bank syariah. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang berada di bawah

PTAIN – salah satunya Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon perlu mengembangkan disiplin ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bidang tersebut di Indonesia, masih minim. Di Dubai dan Arab Saudi yang menjadi pusat perbankan syariah dunia, mayoritas pekerjanya berasal dari Malaysia dan Pakistan. Keterbatasan tersebut juga menjadi salah satu kendala perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Senada dosen IAI Bunga Bangsa Cirebon mengatakan:

“Untuk menjaga nama baik dan kualitas kampus kemudian menjada kuantitas lulusan / alumni agar bisa tersera oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah baik dalam kota maupun luar kota Cirebon”.

Eksisting Kurikulum dan Program Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah

Seperti diuraikan di atas, tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank serta bisnis syariah, pada sisi lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga pendidikan, termasuk IAIN Sunan Ampel, untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam memasok SDM yang dibutuhkan tersebut. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari’ah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga yang disebutkan di atas. Peran Fakultas Syari’ah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.²⁸

Untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas,

²⁸ Hasil wawancara dengan staf pengajar IAIN Cirebon

menguasai sistem ekonomi Islam dan terampil dalam mengelola industri Perbankan Syariah, Keuangan Islam dan bisnis Syariah, sangat ditentukan oleh kurikulum dari suatu institusi pendidikan. Dalam merespon kebutuhan di atas, berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menawarkan pengajaran Ekonomi Islam. Pengajaran Ekonomi Islam di Indonesia yang telah ada sekarang ini, seperti yang dipaparkan dalam *Blue Print Ekonomi Syariah Tahun 2004*, dapat digolongkan menjadi beberapa kategori.

Untuk itulah, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencoba hadir untuk mencetak lulusan dengan kompetensi dalam bidang ekonomi Islam secara utuh sebagaimana diharapkan serta untuk mengatasi berbagai kelemahan system pengajaran ilmu ekonomi Islam yang ada dan dipraktekkan oleh berbagai perguruan tinggi, maka Program Studi Ekonomi Syariah mencoba merumuskan dan merancang kurikulum dan system pengajarannya dengan mengkompilasi dari berbagai kurikulum dan system pengajaran yang sudah ada itu.

Melihat kepada kurikulum dan metode pembelajaran yang dipaparkan di atas, maka Prodi Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tentunya menyusun kurikulumnya dengan juga melihat kepada berbagai kelebihan dan kekurangan dari pola yang sudah dilaksanakan. Dengan pola seperti itu, ditambah dengan berdiskusi dan meminta masukan dari para user dan stakeholder yang terdiri dari para praktisi perbankan Syariah, asuransi Syariah dan keuangan Islam, Prodi Ekonomi Syariah tampil lebih percaya diri dan lebih menyakinkan.

Berdasarkan itu, maka Kurikulum Ekonomi Syariah dibangun dengan memadukan antara ilmu-ilmu teoritis dengan praktis (30:70), ekonomi konvensional

dengan ekonomi Syariah (40:60), Ilmu Keislaman (30 persen), Ilmu Kesyariahan (20 persen) – Ushul Fiqih, Qawaid Fiqhiyah fi al-Iqtishad, Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah dan Fikih Zakat dan Wakaf. Selain itu, kurikulumnya juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat (30 persen), yang terdiri dari, bahasa (Arab/Inggris), ICT (Aplikasi Komputer), Matematika, Statistik dan Akuntansi. Kemudian, Kurikulum ini juga diperkaya dengan penguatan di bidang Kewirausahaan (20 persen), yang terdiri dari Pengantar Bisnis, Kewirausahaan, Studi Kelayakan Bisnis, Analisis Prilaku Konsumen, Marketing Produk, Analisis Laporan Keuangan dan Etika Bisnis Islam. Secara rinci Kurikulum Ekonomi Syariah ini dapat dilihat di halaman terahir dari paparan ini.

Kesimpulan

Perguruan tinggi sebagai tempat yang melahirkan dan menciptakan lulusan sumber daya insani perbankan syariah, juga perlu membekali para lulusan dengan berbagai macam keilmuan terkait dengan perbankan syariah, bukan hanya secara teoritis saja, melainkan bersifat praktis juga. Peran yang paling penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Cirebon agar dapat bersinergi dengan perbankan syariah yang ada di Cirebon, dengan tujuan agar kiranya lulusan nanti mempunyai pemahaman dan keilmuan yang cukup untuk menjadi bagian dari sumber daya insani perbankan syariah. Tentunya, perguruan tinggi harus dapat meningkatkan peran aktifnya dalam melahirkan sumber daya insane perbankan syariah. Dalam proses pembelajaran, penyusunan harus memuatkan mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta

dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi.

1. Persepsi pihak industry perbankan syariah terhadap kompetensi lulusan perbankan syariah maupun ekonomi syariah di Cirebon masih sangat kurang terhadap penguasaan berbagai macam keilmuan, seperti penggunaan teknologi, komunikasi lisan serta penggunaan bahasa asing. Di samping itu, pihak industry perbankan syariah juga mempunyai persepsi terhadap lulusan ekonomi syariah bahwa mayoritas lulusan ekonomi syariah di Cirebon masih sangat kurang terhadap ilmu-ilmu yang bersifat praktis, seperti pengetahuan tentang produk syariah, tehnik mengkomunikasi market syariah, serta perlu menghayati mengenai service excellent yang berjiwa Islami.

Adapun strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Cirebon dalam melahirkan SDI yang dapat memenuhi standard perbankan syariah, seperti perlu adanya peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta soft skill. Di samping itu, perlu juga adanya kegiatan magang dan Praktiku yang dilakukan secara sistematis, hal itu bertujuan agar mahasiswa terbiasa dengan hal yang praktis dalam perbankan syariah. Serta meningkatkan mata kuliah praktek, dan perlu melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran dan penyusun kurikulum akademik, terkait dengan mata kuliah yang tidak penting agar dapat dipangkas dan ditambah dengan mata kuliah substansi perbankan syariah

Daftar Pustaka

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Syariah Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank

Indonesia. 2009. *Syariah Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Pronk, Jan. 2001. "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*, London: Zed Books

Manzoor, S. Parvez. 2004. "Book Review 'Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity'" oleh Johan Meuleman (ed.) (2002), London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2, Mei 2004.

Moten, Abdul Rashid. 2005. "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategiec Challenges for the 21st Century*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Huda, nurul, dkk. 2008. *Syariah Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara

Rivai, Veithzal, dan Andi Bukhari. 2009. *Islamic economics: Syariah syari'ah bukan opsi tapi solusi*. Jakarta: Bumi Aksara

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Syariah Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka